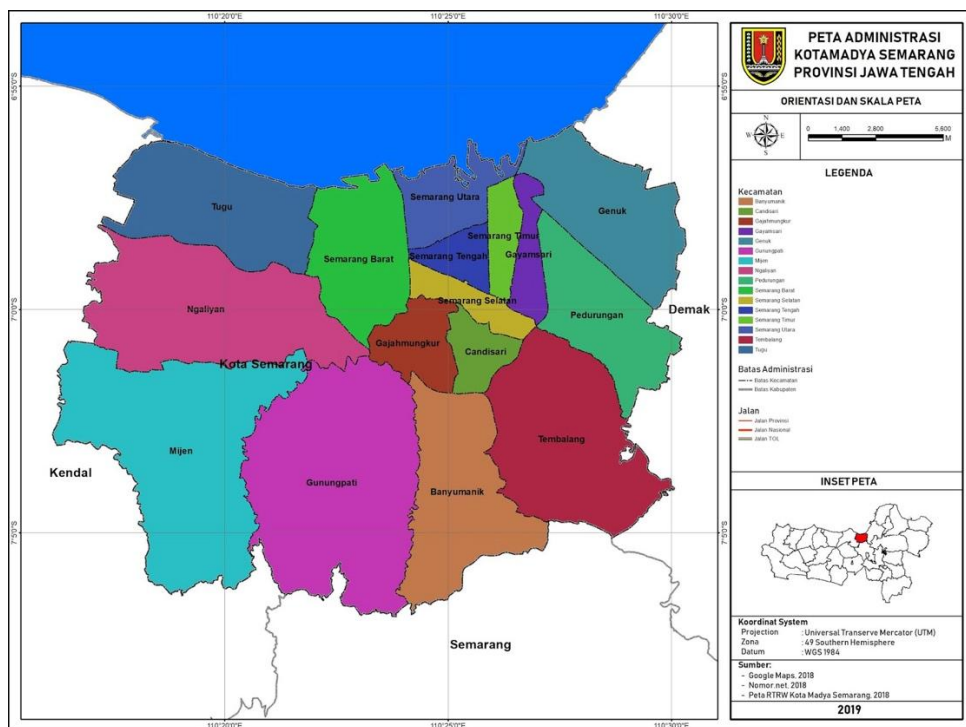


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang



Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

Sumber: *NeededThing*, (2019)

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan jasa di wilayah utara Pulau Jawa. Secara geografis, Kota Semarang terletak pada 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 373,70 km². Kota ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara,

Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat.

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 1,69 juta jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024). Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Semarang Atas dan Semarang Bawah. Semarang Atas merupakan kawasan perbukitan dengan ketinggian antara 90–350 meter di atas permukaan laut, sedangkan Semarang Bawah merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0–3 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis inilah yang menyebabkan sebagian wilayah Kota Semarang, khususnya di bagian utara dan timur, seperti Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Semarang Utara, sangat rentan terhadap bencana banjir dan rob.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
1	Mijen	56,52
2	Gunung Pati	58,27
3	Banyumanik	29,74
4	Gajah Mungkur	9,34
5	Semarang Selatan	5,95
6	Candisari	6,40
7	Tembalang	39,47
8	Pedurungan	21,11
9	Genuk	25,98

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
10	Gayamsari	6,22
11	Semarang Timur	5,42
12	Semarang Utara	11,39
13	Semarang Tengah	5,17
14	Semarang Barat	21,68
15	Tugu	28,13
16	Ngaliyan	42,99
17	Kota Semarang	373,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, (2023)

Dari aspek ekonomi, Kota Semarang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, (2025), laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mencapai 5,62%, didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa transportasi dan logistik. Namun, ketimpangan antara wilayah Semarang Atas dan Semarang Bawah masih cukup terlihat. Wilayah pesisir, seperti Kecamatan Genuk dan Kecamatan Semarang Utara, cenderung memiliki tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap.

Selain itu, Kota Semarang juga menghadapi tantangan besar dalam aspek lingkungan dan tata ruang. Fenomena penurunan muka tanah (*land subsidence*), curah hujan yang tinggi, dan kenaikan muka air laut (*rob*) menyebabkan sebagian wilayah pesisir sering mengalami banjir berulang. Berdasarkan laporan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, (2025), sedikitnya terdapat 50 kelurahan yang terdampak banjir pada tahun tersebut. Kondisi ini menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu kota dengan tingkat risiko bencana hidrometeorologi tertinggi di Pulau Jawa.

Dari sisi sosial, Kota Semarang memiliki masyarakat yang majemuk dan multikultural. Keberagaman etnis, seperti Jawa, Tionghoa, Arab, dan berbagai komunitas pendatang dari daerah lain di Indonesia, telah membentuk dinamika sosial yang kaya dan harmonis. Semangat gotong royong dan solidaritas sosial masih menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Semarang, terutama dalam menghadapi situasi darurat, seperti bencana banjir. Pemerintah Kota Semarang melalui berbagai program dan kebijakan berupaya mengurangi dampak bencana, salah satunya melalui program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, BPBD, dan berbagai lembaga sosial lainnya.

Dengan latar belakang geografis, sosial, dan ekonomi tersebut, Kota Semarang menjadi contoh yang menarik dalam kajian kebijakan publik dan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dalam konteks penelitian ini, Kecamatan Genuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan yang paling sering mengalami banjir tahunan serta menjadi fokus utama penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah.

2.1.2 Keadaan Demografis Kota Semarang

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 1,7 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan yang stabil sekitar 1,6% per tahun

(Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024). Penduduk Kota Semarang mayoritas berada pada kelompok usia produktif yaitu antara 15 hingga 54 tahun yang mencapai sekitar 66,37% dari total populasi. Kelompok usia anak-anak (0-14 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas) masing-masing memiliki persentase 20,75% dan 13%. Komposisi ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar sekaligus kebutuhan akan program sosial yang menyentuh seluruh kelompok usia, terutama dalam konteks penanggulangan bencana banjir yang menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak dan lansia. Persebaran penduduk di Kota Semarang tidak merata. Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Tengah merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi, mencapai lebih dari 12 ribu penduduk per km², sedangkan Kecamatan Tugu memiliki kepadatan paling rendah sekitar 1.176 jiwa per km². Kecamatan Genuk yang menjadi fokus penelitian juga termasuk daerah dengan kepadatan tinggi dan rentan bencana banjir akibat kondisi geografisnya (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023).

2.1.3 Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Kota Semarang pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dan stabil sebagai hasil dari berbagai program pembangunan serta pengembangan sektor usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada tahun tersebut mencapai sekitar 5,62%, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp267,551 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp170,947 triliun (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025). Angka pertumbuhan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai

tantangan, seperti dampak bencana banjir dan fluktuasi ekonomi nasional, Kota Semarang tetap mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonominya secara positif.

Sektor utama yang menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi Kota Semarang adalah industri manufaktur, konstruksi, dan perdagangan. Industri manufaktur terutama didominasi oleh sektor pengolahan makanan, minuman, tekstil, dan barang logam yang secara langsung menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor konstruksi juga mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pembangunan infrastruktur yang bertujuan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan penataan wilayah kota. Selain itu, sektor perdagangan, terutama perdagangan eceran dan grosir, turut menjadi pilar penting perekonomian kota yang mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang dinamis dan beragam.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Semarang menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dengan sekitar 67% penduduk usia produktif yang aktif dalam angkatan kerja. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada angka 7,2%, yang sebagian besar terdapat pada kelompok pekerja informal dan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana banjir. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan berkurangnya sumber pendapatan keluarga. Sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting sebagai penyangga perekonomian lokal. Namun, sektor ini juga rentan terhadap bencana alam, terutama banjir yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik serta gangguan terhadap distribusi barang dan kegiatan produksi.

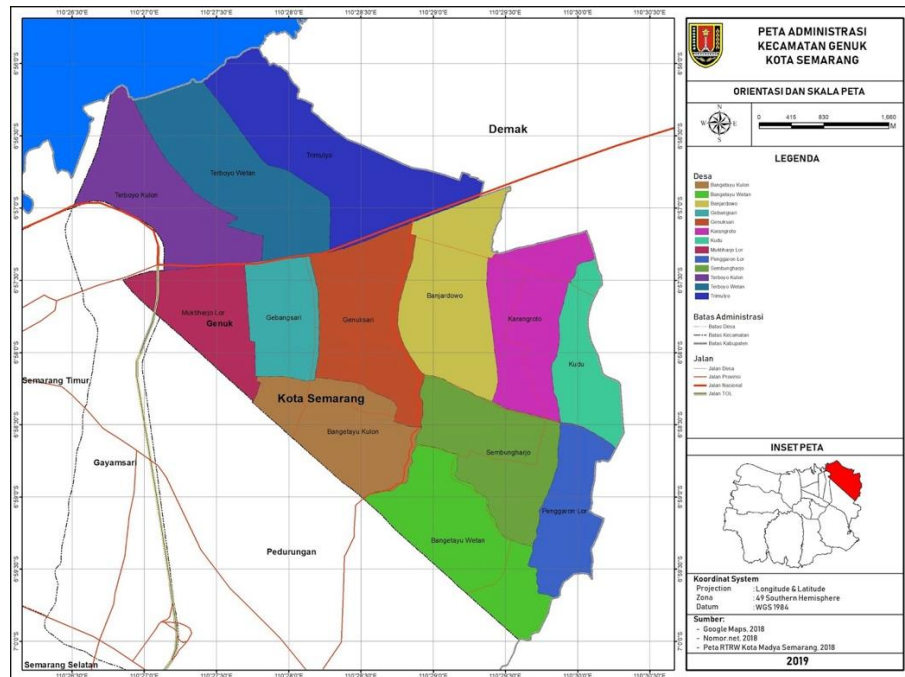
Dalam aspek pendapatan dan kesejahteraan, Kota Semarang mencatat adanya ketimpangan pendapatan yang terasa khususnya antara kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran seperti Kecamatan Genuk. Tingkat kemiskinan secara keseluruhan berada di kisaran 6,5%, yang menunjukkan perlunya program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang terarah untuk membantu kelompok masyarakat rentan agar dapat segera pulih pascabencana banjir. Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 5,46 triliun yang difokuskan pada penanganan masalah kemiskinan, ketahanan pangan, dan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk rehabilitasi pascabencana.

Secara keseluruhan, perekonomian Kota Semarang menghadapi tantangan dari fluktuasi ekonomi global dan dampak lokal seperti banjir, namun tetap menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang positif. Inisiatif-inisiatif strategis seperti program pasar pangan murah, pengembangan UMKM, dan investasi infrastruktur menjadi kunci untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi ekonomi ini sangat relevan sebagai landasan mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan program bantuan sosial dalam membantu masyarakat yang terdampak oleh bencana terutama di kecamatan seperti Genuk.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Genuk

2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Genuk

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kecamatan Genuk, Kota Semarang



Sumber: *NeededThing*, (2019)

Kecamatan Genuk merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Genuk terletak di bagian timur Kota Semarang dan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa wilayah penting. Di sebelah utara, Kecamatan Genuk berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak. Di sebelah selatan, Kecamatan Genuk berbatasan dengan Kecamatan Pedurungan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Semarang Utara. Posisi geografis ini memberikan karakteristik yang unik berupa perpaduan wilayah pesisir dan dataran

rendah yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta tingginya risiko bencana, khususnya banjir dan rob (*gelombang pasang*).

Luas wilayah Kecamatan Genuk sekitar 2.738 hektar atau 27,38 km² yang sebagian besar merupakan dataran rendah dengan kemiringan tanah yang sangat landai, sebagaimana karakteristik wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Ketinggian rata-rata wilayah Kecamatan Genuk berada pada kisaran 0 hingga 2,5 meter di atas permukaan laut sehingga wilayah ini sangat rentan terhadap banjir, terutama pada musim hujan dan saat terjadi pasang air laut yang tinggi. Curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm, dengan suhu udara antara 29°C hingga 35°C. Kondisi tersebut turut meningkatkan kerentanan lingkungan, terutama dari aspek hidrologi dan iklim mikro.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kelurahan di Genuk

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
1.	Mukktiharjo Lor	1,35
2.	Gebangsari	1,22
3.	Genuksari	2,19
4.	Bangetayu Kulon	1,92
5.	Bangetayu Wetan	2,05
6.	Sambungharjo	2,07
7.	Penggaron Lor	1,36
8.	Kudu	1,85
9.	Karang Roto	2,09
10.	Banjar Dowo	2,48
11.	Trimulyo	2,90

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
12.	Terboyo Wetan	2,13
13.	Terboyo Kulon	2,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, (2024)

Penggunaan lahan di Kecamatan Genuk menunjukkan adanya kombinasi antara lahan pertanian dan kawasan industri yang menjadi ciri khas wilayah ini. Sekitar 3,1% dari total luas wilayah digunakan untuk lahan pertanian sawah, yaitu seluas 85 hektar, sedangkan sekitar 544 hektar merupakan lahan pertanian nonsawah. Sementara itu, lebih dari 2.000 hektar lainnya merupakan lahan nonpertanian yang dimanfaatkan untuk kegiatan industri, permukiman, perdagangan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Perkembangan sektor industri di Kecamatan Genuk berlangsung cukup pesat sehingga wilayah ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang penting. Namun, kondisi tersebut juga menjadikan Kecamatan Genuk sebagai wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang perlu dikelola secara optimal.

Kondisi geografis yang khas tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan di Kecamatan Genuk. Karena berada di kawasan dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, Kecamatan Genuk sangat rentan terhadap banjir rob maupun banjir yang disebabkan oleh curah hujan ekstrem. Oleh karena itu, pengelolaan tata ruang, pengembangan sistem drainase, serta upaya mitigasi bencana menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Penanganan yang tepat terhadap kondisi geografis tersebut sangat menentukan keberhasilan program

bantuan sosial dan proses pemulihan pascabencana, khususnya dalam mendukung masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Genuk.

2.2.2 Kondisi Demografis Kecamatan Genuk

Secara demografis, karakteristik penduduk Kecamatan Genuk didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu mereka yang berusia 15 sampai dengan 54 tahun, dengan proporsi sekitar 65% dari total penduduk. Kelompok usia anak-anak (0-14 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas) masing-masing menyumbang sekitar 20% dan 15% dari jumlah penduduk. Proporsi ini mencerminkan basis tenaga kerja potensial yang cukup besar di wilayah ini, namun juga menunjukkan kebutuhan program kesejahteraan dan perlindungan sosial yang menjangkau berbagai kelompok usia, terutama dalam menghadapi risiko bencana seperti banjir yang sering melanda wilayah Genuk (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024).

Tabel 2. 3 Data Penduduk Kecamatan Genuk Berdasarkan Usia 2024

Kelompok Usia	Jumlah (Jiwa)
0-4 tahun	9.235
5-9 tahun	11.235
10-14 tahun	11.371
15-19 tahun	10.416
20-24 tahun	9.918
25-29 tahun	9.867
30-34 tahun	10.430
35-39 tahun	10.266
40-44 tahun	11.323

Kelompok Usia	Jumlah (Jiwa)
45-49 tahun	9.483
50-54 tahun	7.837
55-59 tahun	6.553
60-64 tahun	4.868
65-69 tahun	3.164
70-74 tahun	1.647
> 75	1.306

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, (2026)

Rasio jenis kelamin di Kecamatan Genuk relatif seimbang, dengan angka sekitar 101 laki-laki per 100 perempuan, menandai distribusi penduduk yang hampir merata antara kedua jenis kelamin. Hal ini penting untuk mempertimbangkan kebijakan dan program sosial yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut. Penduduk Kecamatan Genuk sebagian besar bermata pencaharian sebagai pekerja di sektor industri dan perdagangan, mengingat wilayah ini juga merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri Kota Semarang. Konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah ini turut berkontribusi pada pola demografis yang dinamis dan terus berkembang.

Tabel 2. 4 Data Penduduk Genuk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	64.650	50,15%
Perempuan	64.269	49,85%
Total	128.919	100%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, (2026)

Fenomena urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kecamatan Genuk memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di permukiman padat dan kawasan industri, berpotensi memperburuk kerentanan terhadap bencana banjir, yang menjadi fokus utama dalam penelitian evaluasi program bantuan sosial. Kepadatan dan dinamika penduduk ini selain menimbulkan tantangan dalam pengelolaan fasilitas publik dan infrastruktur, juga memerlukan pendekatan program sosial yang holistik dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi demografis yang ada, program bantuan sosial yang dievaluasi dalam penelitian ini harus mampu menjangkau sasaran yang paling rentan seperti kelompok anak-anak, lansia, serta keluarga miskin yang berada di wilayah terdampak banjir.

2.3 Profil Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas urusan sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melapor langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokoknya mencakup membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial, termasuk perumusan kebijakan teknis untuk pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin,

dengan fungsi utama seperti koordinasi program, pembinaan bawahan, penyusunan rencana strategis, dan pelaporan kegiatan kepada pimpinan.

Struktur organisasinya terdiri dari Kepala Dinas di puncak, didukung Sekretariat dengan tiga Sub Bagian (Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, serta Humas dan Hukum), serta empat Bidang utama: Pemberdayaan Sosial (dengan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial), Rehabilitasi Sosial (dengan Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia serta Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial), Perlindungan dan Jaminan Sosial (termasuk Seksi Jaminan Sosial Keluarga), dan Penanganan Fakir Miskin, di mana setiap Bidang dan Seksi dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan evaluasi tugas masing-masing.

Secara operasional, dinas ini mengelola program harian seperti penyaluran bantuan sembako, rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), perlindungan anak jalanan, lansia, dan penyandang disabilitas, serta pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, dengan dasar hukum tambahan dari Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2016 (diperbarui Nomor 99 Tahun 2021) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja. Informasi lengkap tersedia di situs resmi dinsos.semarangkota.go.id untuk mendukung penelitian skripsi.

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, suatu badan memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan Bersama yang ingin dicapai. Dinas Sosial memiliki visi

yaitu “Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kota Semarang yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki beberapa misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Masyarakat rentan sosial
3. Meningkatkan penanganan Masyarakat terdampak bencana dan kelompok rentan lainnya.
4. Meningkatkan pemberdayaan sosial Masyarakat untuk mendukung kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Misi tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan berbagai program pelayanan sosial, termasuk penanganan masyarakat terdampak banjir melalui penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. Dalam konteks penelitian ini, visi dan misi Dinas Sosial Kota Semarang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Genuk sebagai bentuk perlindungan sosial dan upaya mendukung pelaksanaan program bantuan sosial

2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2021, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan

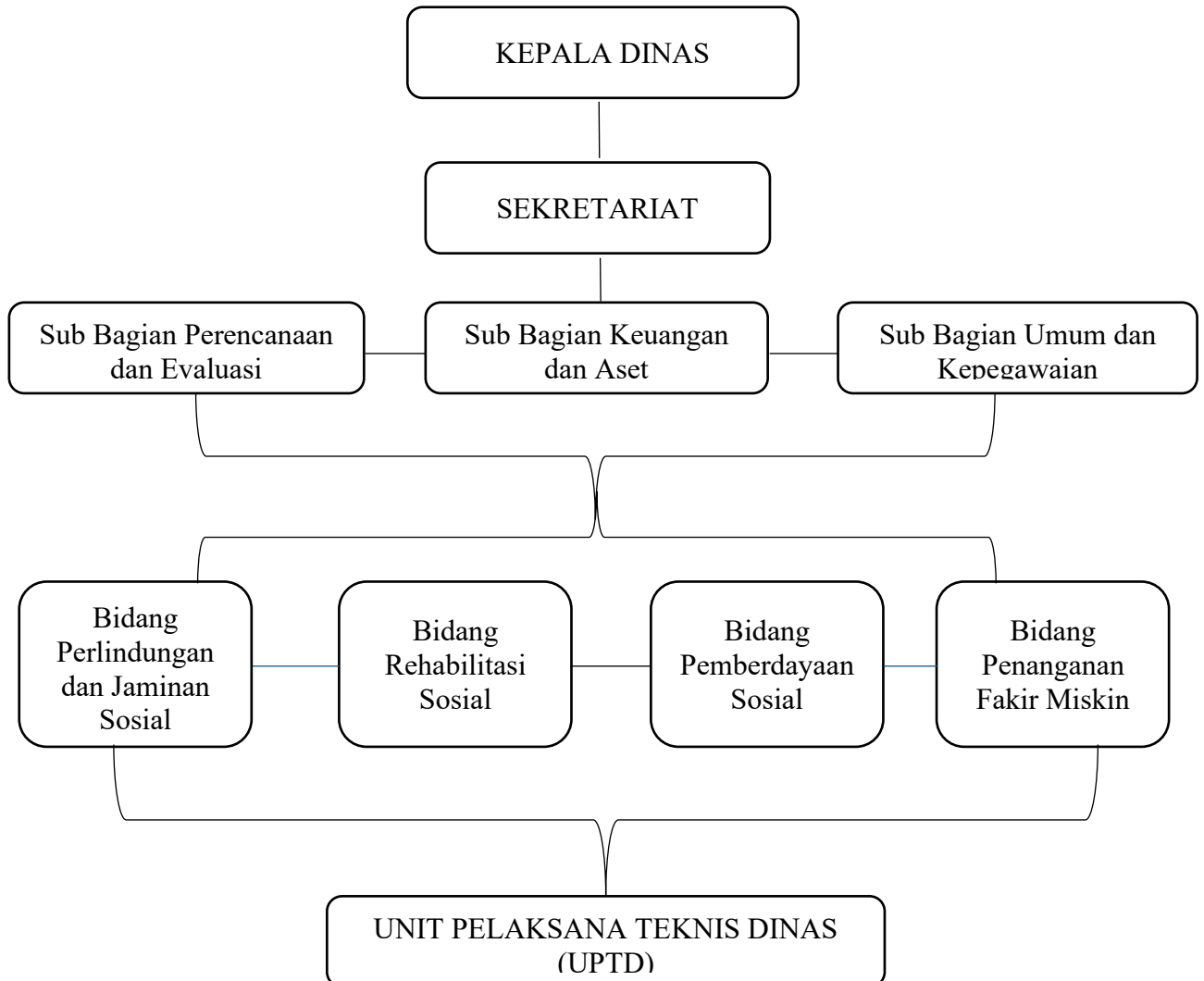
urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.
4. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
5. Pelaksanaan penanganan masyarakat terdampak bencana.
6. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang kesejahteraan sosial.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pelayanan sosial.

Dalam pelaksanaan penanganan bencana banjir, Dinas Sosial memiliki fungsi penting dalam proses penyediaan bantuan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Selain itu, Dinas Sosial juga bertanggung jawab dalam proses pendataan masyarakat terdampak yang nantinya digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Pada kejadian banjir di Kecamatan Genuk, Dinas Sosial Kota Semarang juga berperan dalam penyediaan dapur umum dan distribusi makanan siap saji kepada masyarakat terdampak banjir. Hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat berlangsung.

2.3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang

2.4 Kondisi Banjir di Kecamatan Genuk

Banjir di Kecamatan Genuk bukan merupakan peristiwa yang terjadi sesekali, melainkan telah menjadi permasalahan yang berlangsung secara berulang dari tahun ke tahun. Hampir setiap musim penghujan, beberapa kelurahan di Kecamatan Genuk mengalami genangan dengan tinggi air yang bervariasi. Kondisi tersebut diperparah ketika curah hujan tinggi terjadi bersamaan dengan pasang air

laut, sehingga genangan berlangsung lebih lama dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Beberapa wilayah yang sering terdampak banjir antara lain Kelurahan Trimulyo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Muktiharjo Lor, Genuksari, Karangroto, Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, dan Kudu Badan Pusat Statistik Kota Semarang, (2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi kejadian banjir di Kecamatan Genuk menunjukkan bahwa wilayah ini masih menjadi salah satu kawasan prioritas dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Selain dipengaruhi oleh faktor alam, kondisi tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat perkembangan kawasan industri, permukiman, serta perubahan tata guna lahan yang memengaruhi kemampuan daerah dalam menyerap dan mengalirkan air (Ayuningtyas & Pigawati, 2019). Akibatnya, banjir tidak hanya terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi, tetapi pada beberapa wilayah genangan juga dapat muncul akibat rob meskipun curah hujan tidak terlalu tinggi.

Dampak banjir yang terjadi di Kecamatan Genuk tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Genangan air menyebabkan aktivitas transportasi terganggu karena banyak ruas jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan. Selain itu, rumah warga, fasilitas umum, tempat ibadah, sekolah, serta sarana kesehatan juga sering terdampak banjir. Aktivitas ekonomi masyarakat ikut mengalami gangguan karena sebagian warga tidak dapat bekerja, terutama masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sektor informal, perdagangan, jasa, maupun usaha kecil. Pada beberapa kondisi, banjir juga menyebabkan kerusakan barang-barang rumah

tangga, peralatan kerja, hingga meningkatnya pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Banjir yang berlangsung dalam waktu cukup lama juga berdampak pada aspek kesehatan masyarakat. Genangan air yang tidak segera surut berpotensi meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit, seperti penyakit kulit, diare, infeksi saluran pernapasan, serta penyakit lain yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meliputi kebutuhan air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya selama masa tanggap darurat berlangsung.

Sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi, Kecamatan Genuk menjadi salah satu fokus penanganan Pemerintah Kota Semarang. Penanganan dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan kondisi banjir, pendataan masyarakat terdampak, penyediaan posko dan dapur umum, distribusi logistik, penyediaan air bersih, evakuasi masyarakat apabila diperlukan, hingga pemberian bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa darurat.

Meskipun berbagai upaya penanganan terus dilakukan, banjir di Kecamatan Genuk masih menjadi permasalahan yang berulang sehingga membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak

bencana banjir. Oleh karena itu, pelaksanaan program bantuan sosial menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi beban yang dialami selama masa bencana. Berdasarkan kondisi tersebut, Kecamatan Genuk dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir.

2.5 Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Banjir

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial akibat suatu peristiwa, termasuk bencana alam. Dalam penanggulangan bencana banjir, bantuan sosial bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sehingga keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjaga pada saat kondisi darurat. Bantuan sosial juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana melalui penyediaan berbagai kebutuhan dasar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Bencana banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menyebabkan terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak dapat berupa makanan siap saji, sembako, logistik darurat, air bersih, pakaian, perlengkapan tidur, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan tingkat dampak dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan bantuan sosial di Kota Semarang mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban bantuan sosial yang bersumber dari APBD kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial, termasuk masyarakat yang terdampak bencana banjir. Melalui regulasi tersebut, pelaksanaan bantuan sosial diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran (Pemerintah Kota Semarang, 2022).

Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan kepada korban bencana juga mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa pemberian bantuan kepada korban bencana dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan asesmen kebutuhan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, sebelum bantuan disalurkan dilakukan identifikasi terhadap kondisi masyarakat, tingkat dampak bencana, serta kebutuhan yang paling mendesak sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2008).

Proses penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan kejadian bencana, pendataan masyarakat terdampak, asesmen kebutuhan, penentuan jenis bantuan, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima. Pelaksanaan tahapan tersebut melibatkan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),

Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, RT/RW, relawan, serta unsur masyarakat lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Dalam penanganan bencana banjir, bantuan sosial tidak hanya dipahami sebagai penyaluran bantuan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang mengalami risiko akibat bencana. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketepatan sasaran penerima bantuan, kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat, kecepatan penyaluran, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penyelenggaraannya.